

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah adalah masalah klasik yang ada di Indonesia. Mulai dari sampah plastik, daun-daun dan sampah lainnya. Dari Kompas.com mengemukakan bahwa berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9 persennnya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025.

Sampah menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat. Selama ini masyarakat membuang begitu saja ke tempat. Salah satu akibatnya menyebabkan bencana alam seperti banjir. Ini disebabkan karena masyarakat kurang mencintai lingkungan dengan tetap membuang sampah sembarang tempat baik di jalan sampai ke sungai-sungai. Dari bencana alam tersebut, pemerintah dapat belajar sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti sebelumnya. Apalagi sebagian masyarakat membuang sampah yang ada tanpa memilihnya terlebih dahulu, padahal ada jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali agar timbunan sampah menjadi berkurang. Dengan mengolah sampah yang baik, dapat mengurangi

penggunaan lahan dan di sisi lain dapat bernilai ekonomis seperti dengan cara mendaur ulang sampah dan kemudian menjualnya untuk digunakan kembali.

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. BAB 2 pasal 3 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana kerja pengurangan sampah sebagai mana pada ayat 2 dan 3 terdiri atas :

1. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
2. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Pengelolaan dan penanganan sampah yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) yaitu dengan cara mengelola, memakai kembali dan mendaur ulang.

Sistem pengelolaan sampah yang ada di desa Tenjolayar adalah dengan menggunakan metode di bakar dan menimbun sampah yang telah dibakar, pengelolaan sampah di Desa Tenjolayar mempunyai kendala dan hambatan dalam pengelolaannya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi sampah selain minimnya pegawai, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa

sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat, adapun juga hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. Sampah rumah tangga tidak dipilah
2. Saat pengangkutan tidak dipisah

Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Tenjolayar, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Tenjolayar.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu program pada Badan Usaha Milik Desa. Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 87 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 menyatakan “Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa yang kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes bersama-sama dengan masyarakat setempat”.

Berdasarkan pengamatan sejauh ini dari penulis, bahwa Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ditemukan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antara pengelola dengan masyarakat.
2. Kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan sampah.
3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pengelolaan sampah.
4. Kurangnya fasilitas yang memadai dalam pengelolaan sampah.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi tersebut di atas mengidentifikasi bahwa dalam program BUMDes pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka masih belum maksimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **“Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Pengelolaan di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka belum optimal.”**

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya untuk teori implementasi kebijakan
- 2) Untuk menambah hasanah litelatur dalam bidang administrasi publik khususnya tentang Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha

Milik Desa pada Pengelolaan Sampah di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

1.5.2. Kegunaan Praktik

- 1) Untuk Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka memberikan masukan kepada Pemerintah / aparatur desa di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih.
- 2) Untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam melaksanakan program yang diberi oleh pemerintah desa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2008:60) kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Dan berdasarkan teori-teori Yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Sugiyono (2008:65) mengatakan bahwa : kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Menurut Parsons (2005:81) bahwa kebijakan publik adalah hasil karya *policy makers* (bersama dengan orang-orang kepercayaan mereka di dalam lingkaran kekuasaan), dan tahap-tahap tersebut adalah langkah-langkah yang harus atau biasanya dilalui oleh *policy maker* untuk menghasilkan suatu kebijakan serta peristiwa atau tindakan yang mengikutinya.

Dalam kerangka pemikiran penulis mengemukakan empat faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi yang diambil dari teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (Budi Winarno, 2012:178) sebagai berikut :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber-Sumber (*resources*)
3. Kecenderungan-Kecenderungan (*tendencies*)
4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic Strukture*)

Variabel komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi seperti diatas dijadikan teori dalam penyusunan proposal skripsi ini sehingga pada uraian selanjutnya penulis mencoba mengulas lebih rinci

1. Komunikasi (*Communication*)

Persyaratan yang paling utama bagi implementasi adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah itu diikuti oleh para pelaksana apa yang menjadi sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada para kelompok sasaran sehingga akan mengurangi

distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak dimengerti oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Menurut Edwards terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Trasmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*Implementor*) kebijakan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan agar kebijakan tersebut sukses untuk diimplementasikan.
 - c. Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan kelompok sasaran dan pihak-pihak berkepentingan.
2. Sumber-Sumber (*Resources*)

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

Walaupun kebijakan sudah di komunikasikan kepada para pelaksana secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumberdaya adalah faktor yang paling penting untuk implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya kebijakan hanya kertas yang hanya menjadi dokumen saja. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, kegagalan yang biasa terjadi dari implementasi kebijakan salah satunya karena staf yang tidak kompeten dibidangnya. Disatu sisi kekurangan staf juga merupakan masalah yang pelik menyangkut implementasi kebijakan.
- b. Informasi, informasi memiliki dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan, karena pelaksanaan kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukan. Dengan begitu para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai program-program informasi ini penting bagi kebijakan-kebijakan baru dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis.
- c. Wewenang, wewenang merupakan suatu legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Fasilitas, Kebijakan tanpa adanya fasilitas contohnya sarana prasarana maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Kecenderungan-Kecenderungan (*tendencies*)

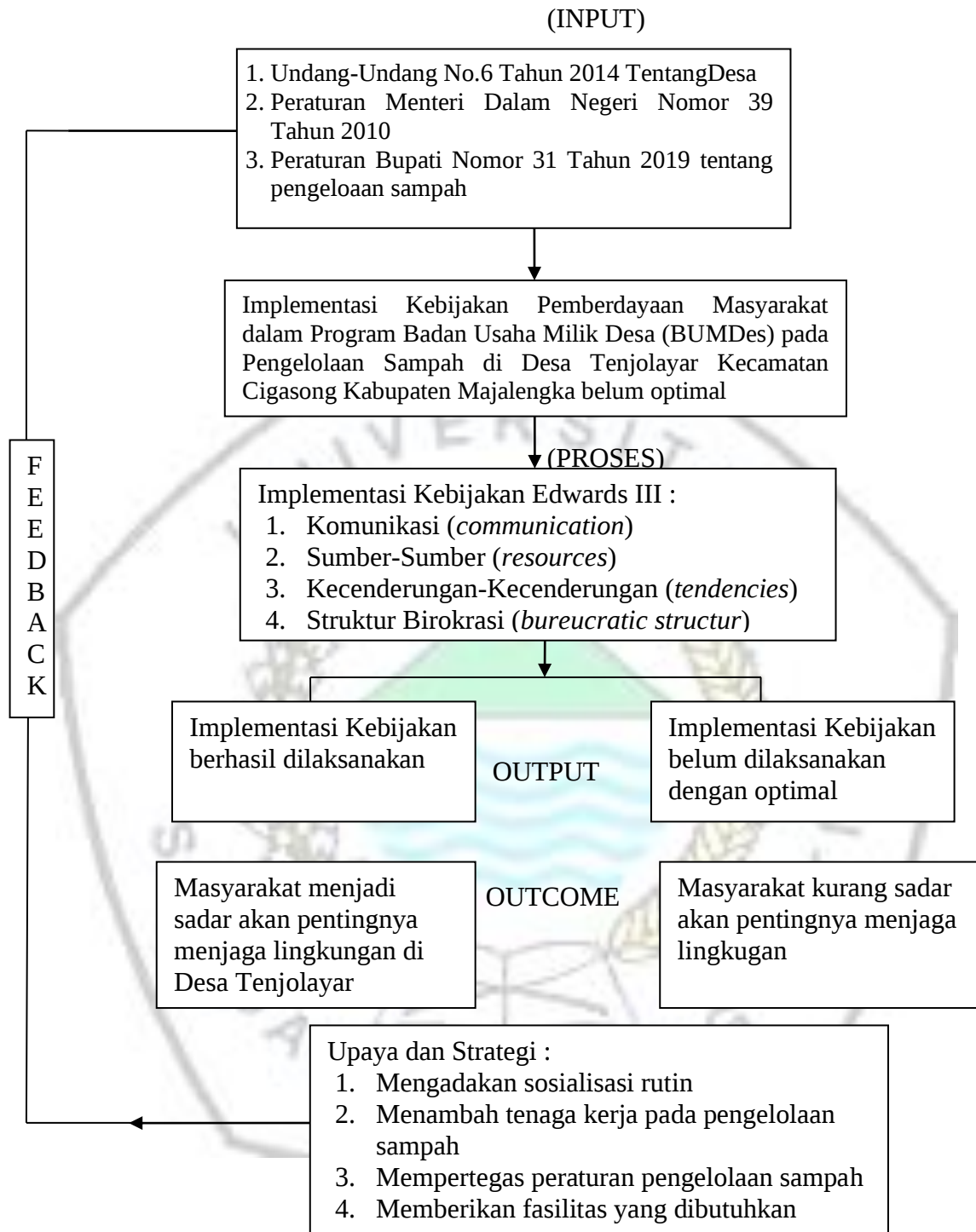
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku- tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dan ada pula hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada kecenderungan-kecenderungan yaitu :

- a. Pengangkatan birokrasi, sikap implementor akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi para kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif, mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Edward menyarankan teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi intensif-intensif oleh karena pada umumnya orang akan bertindak menurut kepentingannya sendiri.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Strukture*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan dalam struktur organisasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edwards ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah lebih baik dengan memberlakukannya pertama, Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu kegiatan yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua, fragmentasi yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja (George Edwards III dalam Budi Winarno 2012:178-210)

Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan Badan Usaha Milik Desa tentang pengurangan sampah meliputi pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan tujuan atau program-program yang diinginkan sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan serta melibatkan individu dan organisasi pemerintah demi kepentingan masyarakat.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai serta ditunjukan untuk individu atau kelompok demi kepentingan masyarakat

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

d. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang dilakukan dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

e. Sampah

Sampah merupakan material sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga, sampah sendiri bisa di anggap berguna untuk sebagian orang yang memanfaatkannya.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Untuk mempermudah dan memahami konsep yang akan diukur dalam penelitian maka perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar dapat memperoleh batasan dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Maka penulis menyusun definisi parameter dan konsep operasional dengan model implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu ada empat faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yaitu : 1. Komunikasi 2. Sumber-sumber 3. Kecenderungan-kecenderungan 4. Struktur Birokrasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditampilkan oprasionalisasi aspek kajian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut Edwards III (Winarno, 2012:178-210)	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber-Sumber	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Kecenderungan- Kecenderungan	1. Pengangkatan Birokrasi 2. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	1. <i>Standar Operating Procedures (SOP)</i> 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang digunakan

Metode penelitian Menurut Sugiono (2017:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu bahwa penelitian yang penulis akan lakukan bukan untuk mencari berapa besar keeratan hubungan antara variabel, juga bukan untuk mencari berapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, tetapi penelitian yang penulis akan lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) pada pengelolaan sampah di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Moleong (2004:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia.

Boglan dan Taylor (Moleong, 2007:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam metode kualitatif ini, maka penulis menggunakan analisis deskriptif dimana dalam menyajikan data menggunakan pemaparan-pemaparan dan gambaran, karena peneliti hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa.

Hal tersebut yang dikemukakan oleh Rakhmat (1995:24) bahwa penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi dan peristiwa.

1.8.2 Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi keterangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Teknik pengambilan informan yaitu dengan cara *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan Kunci (*key informan*) adalah informasi yang didapat langsung dari narasumber atau objek yang diteliti, yaitu :
 - Kepala Desa Tenjolayar
 - Kasi Kesejahteraan
- b. Informan pendukung adalah informan yang mengetahui informasi tetapi tingkat pemahamannya tidak seperti informan kunci, yaitu :
 - Masyarakat

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Sugiono (2017:224) mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi”

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari bahan-bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan landasan guna memecahkan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan penelitian secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung mengenai objek dan masalah penelitian tetapi tidak terlibat langsung proses kerja.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan *key information* (informan kunci) dan Informan pendukung, yaitu :

1. Kepala Desa
2. Kasi Kesejahteraan
3. Masyarakat

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat dipercaya (kredibel). Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini sama seperti validasi dan reabilitas instrument penelitian dalam penelitian kualitatif.

Moleong (2007:320) mengemukakan mengenai keabsahan data sebagai berikut :

Maksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar
- b. Meyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan

- c. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan netralnya dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2007:327) terdapat tujuh teknik pengujian keabsahan data dalam rangka memperoleh kredibilitas (drajat kepercayaan) data yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Pengecekan sejawat
5. Kecukupan referensial
6. Kajian kasus negative
7. Pengecekan anggota

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Pengertian teknik triangulasi menurut Moleong (2007:330) adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu “

Cara yang digunakan dalam triangulasi menurut Moleong (2007:331) adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan data hasil wawancara dengan para informan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan dengan secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema (Moleong 2007:97).

Analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian adalah teknis analisis data secara deskriptif dengan cara menganalisis secara mendalam berbagai data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan data yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian dirinci serta sistematis dan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan deskripsi dan analisis yang lebih tajam.

b. Display data

Yaitu penyajian data dengan bentuk uraian, tabel, gambar, grafik dan sebagainya.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan adalah kegiatan menetapkan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi pencarian makna data serta memberi penjelasan. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data yang disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Adapun alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya masalah pengelolaan sampah di Desa Tenjolayar
2. Informan atau data mudah diperoleh
3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yang dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Dengan uraian jadwal penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]